

# DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN ZAMAN

Sandrino Prasajo, Ario Pamungkas, Danara Syaufandaru, Maulan Yusuf Rifa'I, Abelyo Pangestu Putra Perdana

Universitas Esa Unggul

[sandrinoprasajo@student.esaunggul.ac.id](mailto:sandrinoprasajo@student.esaunggul.ac.id)

## *Abstract*

*Pancasila as a philosophical and ethical system has the flexibility to face the challenges of the ever-changing times. This research aims to analyze how Pancasila values can be implemented to answer social, economic, and cultural changes in the era of globalization. Through a theoretical approach and literature analysis, it was found that Pancasila remained relevant through the reinterpretation of its contextual values. This article also highlights the challenges of implementing Pancasila values, such as corruption and social inequality, which require the revitalization of the Pancasila-based ethical system.*

**Keywords:** *Pancasila, philosophical system, ethical system, globalization, changing times*

## **Abstrak**

Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika memiliki fleksibilitas untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan untuk menjawab perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di era globalisasi. Melalui pendekatan teoretis dan analisis literatur, ditemukan bahwa Pancasila tetap relevan melalui reinterpretasi nilai-nilainya yang kontekstual. Tulisan ini juga menyoroti tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi dan ketimpangan sosial, yang membutuhkan revitalisasi sistem etika berbasis Pancasila.

**Kata Kunci:** Pancasila, sistem filsafat, sistem etika, globalisasi, perubahan zaman

## **Pendahuluan**

Dalam dinamika global yang ditandai oleh kemajuan teknologi, ketidakstabilan geopolitik, dan perubahan sosial yang masif, peran ideologi sebagai fondasi kehidupan berbangsa semakin diuji. Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sistem filsafat,

menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi nilai-nilainya di tengah arus perubahan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila diharapkan mampu menjadi pedoman normatif untuk mengatasi isu-isu strategis, seperti konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap persatuan bangsa.

Franz Magnis-Suseno (2021) menekankan bahwa salah satu keunggulan Pancasila adalah sifatnya yang inklusif dan dinamis, memungkinkan penerjemahan nilai-nilainya ke dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dasar, tetapi juga sebagai pedoman praktis untuk membangun relasi sosial yang adil dan harmonis. Namun, tantangan dalam penerapannya tidak bisa diabaikan. Studi menunjukkan bahwa korupsi, rendahnya kesadaran publik, dan lemahnya penegakan hukum sering kali menghambat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa (Magnis-Suseno, 2021).

Selain itu, globalisasi telah membawa implikasi yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan terhadap budaya asing memberikan peluang untuk memperkaya keberagaman. Di sisi lain, globalisasi juga memperbesar risiko disintegrasi, terutama ketika nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya dipahami atau diterapkan oleh masyarakat. Misalnya, sila Persatuan Indonesia sering kali menghadapi ujian berat dalam menghadapi konflik horizontal berbasis etnis dan agama.

Upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan kebijakan

publik telah dilakukan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala. Magnis-Suseno (2021) menyoroti bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Tanpa kerangka implementasi yang jelas, Pancasila berisiko hanya menjadi simbol normatif tanpa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menjawab tantangan zaman. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diadaptasi untuk menghadapi isu-isu strategis, seperti transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur dan perspektif filosofis, tulisan ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana filsafat Pancasila yang relevan dengan konteks global.

## **Teori**

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memiliki karakteristik unik yang menjadikannya relevan untuk dikaji dalam berbagai perspektif filsafat dan etika. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya menyediakan landasan normatif bagi kehidupan berbangsa, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan

budaya. Pardosi et, al. (2020) menjelaskan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang terdiri atas nilai-nilai dasar yang universal, namun memiliki akar budaya lokal. Sistem ini mencerminkan hubungan antara manusia, masyarakat, dan Tuhan dalam struktur kehidupan yang harmonis. Lima sila Pancasila dipandang sebagai rangkaian prinsip yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, memberikan dasar moral bagi hubungan antarmanusia, sedangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bersama.

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan konteks zaman. Ia menyebut Pancasila sebagai "ideologi terbuka," yang berarti nilai-nilainya dapat diinterpretasikan ulang sesuai dengan tantangan yang dihadapi masyarakat (Magnis-Suseno, 2021a). Pendekatan ini menempatkan Pancasila sebagai filsafat yang dinamis, bukan dogma yang statis.

Sebagai sistem etika, Pancasila menyediakan pedoman moral yang melandasi perilaku individu dan kebijakan publik. Etika Pancasila tidak hanya menekankan pada prinsip normatif, tetapi juga pada pengambilan keputusan yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, misalnya,

menekankan pentingnya pemerataan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Menurut Magnis-Suseno (2021), Pancasila memiliki tiga dimensi utama dalam konteks etika:

1. Dimensi Teologis: Berakar pada pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi sumber nilai-nilai moral universal.
2. Dimensi Sosial: Menyentuh aspek keadilan dan solidaritas dalam hubungan antarmanusia.
3. Dimensi Kebangsaan: Menekankan pentingnya persatuan dan integritas bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.

Dimensi-dimensi ini mencerminkan bahwa etika Pancasila tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, sehingga dapat diterapkan dalam konteks kebijakan negara maupun interaksi sosial.

Dalam kajian filsafat global, Pancasila dapat dilihat melalui kacamata teori keadilan John Rawls (dalam Suhardin, 2023), yang menekankan distribusi sumber daya secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip ini sejalan dengan sila Keadilan Sosial, yang mengutamakan pemerataan dalam ekonomi dan akses terhadap hak-hak dasar. Selain itu, gagasan demokrasi deliberatif yang diusung oleh Habermas (dalam Pooley & Jansen, 2024) dapat digunakan untuk

menganalisis sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Menurut Pooley & Jansen (2024), Habermas berargumen bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan dialog dan musyawarah, sebuah pendekatan yang secara eksplisit tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.

Meskipun memiliki dasar filosofis yang kuat, implementasi nilai-nilai Pancasila seringkali terhambat oleh tantangan konseptual. Magnis-Suseno (2021) mencatat bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, baik di kalangan masyarakat umum maupun pembuat kebijakan. Hal ini memerlukan upaya sistematis untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Menurut Creswell (2021), pendekatan kualitatif cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan

memerlukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan persepsi manusia.

Penelitian ini menggunakan desain studi literatur (library research), yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis dan sistematis literatur yang relevan mengenai teori dan praktik Pancasila. Desain ini mengikuti langkah-langkah analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data (Creswell & Creswell, 2021).

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

**Data Primer:** Buku-buku utama tentang Pancasila, seperti karya akhir Pardosi et, al. (Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro Dalam Perspektif Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegaard Dan Relevansinya Dengan Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia) dan artikel koran Franz Magnis-Suseno (Pancasila, Tidak Kurang, Tidak Lebih, 2021).

**Data Sekunder:** Artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut Creswell (2021), metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan yang berbeda dan mendalam terkait fenomena yang dikaji. Dokumen yang digunakan meliputi

buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan sumber daring yang terverifikasi.

Data kemudian dianalisis data secara induktif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam literatur yang dikaji. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. **Membaca dan Mengorganisasi Data:** Semua literatur yang dikumpulkan dibaca secara mendalam untuk memahami isi dan relevansinya terhadap tujuan penelitian.
2. **Koding Data:** Informasi dalam literatur dikategorikan berdasarkan tema, seperti sifat filsafat Pancasila, dimensi etika, dan tantangan implementasi.
3. **Identifikasi Tema Utama:** Tema-tema yang muncul dari data dikembangkan menjadi kerangka interpretasi, seperti relevansi nilai-nilai Pancasila dengan tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi.
4. **Interpretasi Data:** Data yang telah dianalisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menggali makna mendalam dari nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian (Creswell & Creswell, 2021).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Menurut

Creswell (2021), triangulasi membantu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk menemukan kesamaan atau perbedaan perspektif. Selain itu, proses peer debriefing dilakukan dengan berdiskusi dengan rekan peneliti untuk mengevaluasi temuan dan interpretasi.

## **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Berdasarkan metode studi literatur dan analisis hermeneutik, pembahasan ini dibagi menjadi tiga subbagian: penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat, relevansi etika Pancasila dalam kebijakan publik, dan tantangan serta strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

### **1. Pancasila sebagai Sistem Filsafat**

Pancasila, sebagai sistem filsafat, memiliki sifat fundamental yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Pardosi et, al. (2020) menegaskan bahwa Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia yang terintegrasi dalam lima sila sebagai kesatuan hierarkis. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, berfungsi sebagai dasar moral dan spiritual yang menopang semua sila lainnya. Nilai ini tidak hanya mengedepankan pengakuan

terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga penghormatan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia.

Bahkan Magnis-Suseno (2021) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan reinterpretasi nilai-nilainya sesuai dengan konteks zaman. Sifat ini menjadikan Pancasila dinamis dan relevan dalam menghadapi tantangan modern. Sebagai contoh, sila Persatuan Indonesia dapat dilihat sebagai pedoman filosofis dalam mengelola keberagaman suku, agama, dan budaya di tengah ancaman disintegrasi sosial akibat konflik horizontal. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi normatif tetapi juga alat analisis untuk memahami tantangan sosial yang kompleks.

Di era globalisasi, filsafat Pancasila juga relevan dalam membangun hubungan internasional yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas global. Hal ini mencerminkan fleksibilitas Pancasila sebagai sistem filsafat yang mampu menjawab tantangan lokal dan global secara bersamaan. Dalam hal ini, Pancasila dapat berkontribusi pada wacana filsafat global melalui prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam sila-silanya.

## **2. Relevansi Etika Pancasila dalam Kebijakan Publik**

Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan panduan moral yang dapat

diterapkan dalam berbagai kebijakan publik. Salah satu contohnya adalah implementasi sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam program pengentasan kemiskinan. Prinsip keadilan distributif memberikan landasan bagi kebijakan redistribusi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling rentan (Suhardin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa etika Pancasila relevan untuk mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi yang kian meningkat.

Selain itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya kebijakan berbasis etika lingkungan. Nugroho (2022) menyebut bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan pendekatan berbasis keadilan antar-generasi. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar bagi kebijakan mitigasi perubahan iklim yang adil dan inklusif. Misalnya, program reboisasi atau pengurangan emisi karbon dapat dirancang dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka.

Demokrasi deliberatif juga menjadi aspek penting dalam relevansi etika Pancasila. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

mencerminkan pentingnya dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Menurut Habermas (dalam Pooley & Jansen, 2024), demokrasi deliberatif bukan hanya tentang proses voting, tetapi juga tentang penyelesaian konflik melalui komunikasi yang rasional. Nilai ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana proses musyawarah telah menjadi bagian dari tradisi sosial dan politik.

### **3. Tantangan dan Strategi Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila**

Meskipun memiliki landasan filosofis dan etis yang kuat, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Magnis-Suseno (2021) menunjukkan bahwa pendidikan formal sering kali hanya menekankan hafalan sila-sila Pancasila tanpa menjelaskan relevansi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila sering kali dipandang sebagai konsep abstrak yang sulit diterapkan.

Selain itu, korupsi menjadi ancaman serius bagi implementasi Pancasila. Ketimpangan dalam alokasi sumber daya dan lemahnya penegakan hukum mencerminkan pengabaian terhadap sila Keadilan Sosial. Hal ini membutuhkan penguatan institusi publik yang transparan dan akuntabel. Reformasi birokrasi,

pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menjadi strategi untuk mengatasi masalah ini.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan. Kurikulum berbasis multikulturalisme yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan tantangan global dapat membantu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keberagaman dan solidaritas sosial. Selain itu, program pendidikan informal, seperti diskusi komunitas dan kampanye publik, dapat menjadi alat efektif untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat umum.

Strategi lain yang penting adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah yang inklusif, seperti yang dicontohkan dalam sila keempat, dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas melalui platform diskusi daring.

### **Kesimpulan**

Pancasila memiliki kemampuan adaptif untuk menghadapi perubahan zaman. Lima silanya tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga berfungsi

sebagai panduan dalam merespons tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan selama diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meski begitu, keberhasilan penerapan Pancasila sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam dan komitmen seluruh elemen bangsa. Hambatan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum memerlukan solusi konkret, termasuk melalui reformasi pendidikan dan penguatan institusi. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif juga menjadi kunci penting dalam memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari.

Revitalisasi Pancasila dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis, seperti integrasi nilai-nilai ini dalam kebijakan publik yang berkeadilan dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Pancasila akan terus relevan sebagai dasar kehidupan berbangsa di era modern.

#### Daftar Pustaka

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative,*

*Quantitative, and Mixed Method Approaches.* In *SAGE Publication*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>

Magnis-Suseno, F. (2021a). ETIKA POLITIK Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. In *Jurnal Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–493). [www.gpu.id](http://www.gpu.id)

Magnis-Suseno, F. (2021b). Pancasila, Tidak Kurang, Tidak Lebih. *Kompas*, 6.

Magnis-Suseno, F. (2021c). Tantangan Pancasila Pasca-Orde Baru. *Kompas*, 6.

Nugroho, A. (2022). Etika Lingkungan dalam Perspektif Pancasila. *Filsafat Indonesia*, 12(3), 45–60.

Pardosi, M. T., Maharani, S. D., & Munir, M. (2020). *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro Dalam Perspektif Eksistensialisme Soren Aabye Kierkegaard Dan Relevansinya Dengan Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/193929>

Pooley, J., & Jansen, S. U. E. C. (2024). *Habermas Between Facts and Norms: A Helping of Hope in Dark Times*. 18, 4674–4677.

Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(2), 200–208.

<https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>